

SINDIKASI JUAL-BELI KUNCI JAWABAN UJIAN NASIONAL 2010 (STUDI KASUS JARINGAN JUAL-BELI KUNCI JAWABAN UJIAN NASIONAL 2010 DI KOTA X)

Ika Novitasari¹

ika.novitasari@ui.ac.id

Abstrak

This research focuses on the existence of the syndicate that allegedly buys the answer key of the 2010 National Test in X city. There is a lot of people that getting involved in this answer key trading; the printing clerk works at the printing service where the test was printed, Education Service staff, the teacher at the certain school where this trading occurred, KBB gang who trading this answer key in fifteen High Schools at X city, and the student who bought the answer key. This research uses such qualitative method with descriptive design and using observational approach to collect the data or information. This research found that there is a sophisticated network, towards to syndicate, in this illegal trading crime, with a temporal behaviour which formed by collective and mutual benefits between them.

Kata Kunci : Jual-Beli, Kunci Jawaban, Ujian Nasional

Kegiatan pendidikan adalah kegiatan yang menjembatani antara kondisi-kondisi aktual dengan kondisi-kondisi ideal. Kegiatan pendidikan berlangsung dalam satuan waktu tertentu dan berbentuk dalam berbagai proses pendidikan, yang merupakan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang digunakan untuk mengubah kondisi awal peserta didik sebagai masukan, menjadi kondisi-kondisi ideal sebagai hasilnya (Mudyahardjo, 2004 : 64).

Pada dasarnya masyarakat tidak berkeberatan dengan diselenggarakannya Ujian Nasional yang fungsinya sebagai alat ukur atau parameter terhadap berjalannya sebuah proses pembelajaran, ditujukan agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat kualitasnya (kemendiknas.go.id, 2010). Namun amat sangat disayangkan apabila Ujian

¹ Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Nasional sekadar menjadi sarana murid, guru, sekolah, dan pihak penyelenggara ujian untuk berbuat curang, menyontek, berdagang soal dan kunci jawaban.

Latar belakang terjadinya kecurangan di dalam pelaksanaan Ujian Nasional di setiap tahunnya terjadi karena berbagai sebab, antara lain adalah ketegangan atau ketakutan siswa terhadap pelaksanaan Ujian Nasional itu sendiri (Harian Umum Pelita, Mei 2010). Wuryadi mengatakan bahwa Ujian Nasional telah membelenggu kebebasan dan keadilan siswa, membuat siswa merasa takut akan tingginya standar kelulusan. Beliau memaparkan bahwa untuk mengukur standar kelulusan bisa dilakukan dengan menggunakan akumulasi nilai rapor siswa sejak kelas I hingga kelas III. Sehingga, ada sebuah upaya sinergis untuk mendayagunakan peran dan posisi guru. Pasalnya, Ujian Nasional membuat guru tidak berperan strategis dalam mencerdaskan anak (Republika, 8 Juni 2010). Selain itu, dijelaskan juga oleh St Kartono dalam bukunya yang berjudul “Reformasi Pendidikan”, Ia menyebut bahwa Ujian Nasional tidak memenuhi unsur keadilan karena gurulah yang seharusnya menentukan kelulusan siswa, bukan negara. Sehingga wajar apabila dalam pelaksanaan ujian nasional terdapat beberapa pihak yang mencari keuntungan (Harian Wawasan, 2010). Dan selanjutnya hal inilah yang dijadikan komoditi bagi pihak-pihak terkait yang merasa akan mendapatkan manfaat secara ekonomi. Oleh karena itulah pada akhirnya terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan Ujian Nasional, misalnya saja pengawasan Ujian Nasional yang kurang maksimal, pendistribusian soal Ujian Nasional yang kacau, bocoran jawaban Ujian Nasional, dan tentunya skandal jual-beli jawaban atau soal Ujian Nasional (Koran Tempo, Maret 2010).

Terdapatnya fakta skandal jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional yang selalu terjadi di setiap tahunnya dan hal tersebut merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan permasalahan krusial yang harus ditangani dengan baik demi kemajuan bangsa sehingga apabila terjadi keganjilan dalam dunia pendidikan maka sudah seharusnya diperbaiki, baik itu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Atmodiwirio, 2005 : 49). Permasalahan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional di kota X setiap tahunnya terjadi, dan apabila permasalahan ini tak dibahas atau diteliti lebih jauh maka dikhawatirkan pelaksanaan Ujian Nasional di kota X tak akan berjalan sesuai tujuan utama dan proses pembangunan pendidikan di Indonesia khususnya di kota X akan terganggu.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan segala hal yang terkait dengan jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional SMA tahun 2010 di Kota X, yang mana terkait dengan proses dari pihak-pihak yang terlibat untuk memperoleh kunci jawaban dari soal Ujian Nasional yang ‘dibocorkan’ dan juga proses transaksi jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional yang dilakukan oleh anggota geng KBB dan pihak terkait lainnya. (Studi Kasus Bisnis Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional Tahun 2010 di kota X).

Penelitian sosial ini dilakukan karena terdapatnya temuan fakta adanya jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional yang selalu terjadi di setiap tahunnya di kota X, yang tentu saja menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan di Indonesia, seperti yang diutarakan oleh Arif Rahman, bahwa masih ada yang belum sempurna dilakukan pemerintah untuk menekan terjadinya kebocoran dan kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional (erabarunews.com, 2010). Perumusan permasalahan penelitian ini ditekankan pada penceritaan mengenai jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional SMA tahun 2010 di kota X kepada pembeli kunci jawaban Ujian Nasional, yaitu siswa-siswi kelas 12 peserta Ujian Nasional SMA di kota X.

Cara bertransaksi jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional dilakukan oleh para anggota geng KBB yang mana cara tersebut mereka pelajari dari para senior mereka (alumnus) yang dahulu pernah juga melakukan kegiatan bisnis serupa (pada saat dahulu mereka mengikuti Ujian Nasional). Para senior atau alumnus tersebut juga ada yang memberikan ‘link’ kepada para anggota geng KBB yang berbisnis jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional, yaitu seorang oknum pegawai Dinas Pendidikan kota X (informasi dari informan). Dapat dikatakan bahwa bisnis ini merupakan bisnis besar yang digelar setiap tahunnya dimana siswa SMA yang belum berpenghasilan dan pihak terkait yang ‘bermain’ di dalamnya dapat meraup keuntungan besar, baik itu keuntungan materi (uang) maupun keuntungan reputasi. Banyak pihak yang terlibat dalam jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional 2010 di kota X ini sehingga dapat dikatakan tindakan ini dilakukan oleh suatu jaringan yang bekerja sama karena adanya unsur saling membutuhkan satu sama lain dan bukan termasuk dalam jaringan kejahatan yang sifatnya permanen.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data lapangan, data sekunder, dan studi literatur dan kepustakaan. Penelitian terhadap jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional SMA 2010 yang berlokasi di kota X dengan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang masih merupakan cakupan wilayah kota X dengan waktu penelitian yang umumnya dilakukan pada dini hari.

Kajian Pustaka

Studi oleh Jendrek (1989) tentang reaksi pengajar terhadap kecurangan akademis menemukan bahwa mayoritas pengajar yang menyaksikan adanya kecurangan tidak melaporkan kejadian tersebut (dalam Burke, Polime, dan Slavin, 2007). Selain itu, hasil penelitian Barrett (1996) terhadap 235 sekolah di South Carolina tentang persepsi guru terhadap frekuensi dan keseriusan pelanggaran etis menemukan bahwa lebih dari 25% responden menyatakan 7 (tujuh) kategori tingkah laku yang sering terjadi di sekolah, salah satunya adalah menaikkan nilai siswa karena adanya tekanan administrator dari pusat. Selama ini masyarakat umum sering kali mengidentikkan perilaku kecurangan akademis umumnya dilakukan oleh siswa, namun Hauptman (2002) yang membahas mengenai pelaku kecurangan akademis menyatakan pandangan seperti itu patut dirubah karena faktanya pengajar pun banyak yang melakukan kecurangan akademis, umumnya tindakan yang dilakukan adalah pembiaran dengan berpura-pura tidak mengetahui kecurangan yang dilakukan oleh anak didiknya dan juga membiarkan kecurangan yang dilakukan oleh anak didiknya.

Terdapat pembahasan yang serupa mengenai kecurangan akademis di dalam Crown dan Spiller (1998), Dichtl (2003), serta McCabe dan Trevino (2002) yang menerangkan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan akademis apabila ia melihat orang lain melakukannya atau jika mereka mempersepsikan bahwa kecurangan akademis adalah perilaku yang wajar dan umum terjadi serta dapat diterima di dalam kelompoknya. Green (2004) membahas pula mengenai kecurangan, dimana tindak kecurangan ia katakan dapat terjadi tidak hanya di lingkungan akademi tetapi bisa juga terjadi dalam bidang olahraga, pembayaran pajak, bisnis, politik, bahkan pernikahan. Dari keseluruhan bidang yang menurut Green dapat terjadi

tindak kecurangan, keseluruhannya menyinggung mengenai permasalahan moral. Perasaan moral yang tercederai, merupakan akibat utama dalam setiap tindakan kecurangan, dan umumnya sanksi untuk hal tersebut bukanlah sanksi kriminal (Guenin, 2005).

Adanya keinginan untuk mencapai sukses dalam suatu hal, dibahas pula oleh Lawson (2004). Lawson membahas mengenai siswa sekolah bisnis yang juga mementingkan pencapaian hasil akhir yaitu karir yang sukses tanpa patuh terhadap etika di dalamnya. Siswa sekolah bisnis yakin bahwa orang-orang yang bergelut di dunia bisnis gagal dalam mencapai sukses ketika mereka bertindak terlalu kaku sesuai etika, oleh karena itu mereka lebih meyakini bahwa pencapaian sukses dan peningkatan karir akan lebih mudah diraih ketika mereka bertindak tidak sesuai dengan etika.

Kohn (2007) menjelaskan mengenai adanya kemungkinan lain yang menyebabkan terjadinya kecurangan akademis. Dalam tulisannya yang berjudul “Who’s cheating whom?”, Kohn melihat bahwa terdapat kemungkinan adanya ketidaktepatan penerapan sistem pendidikan dibandingkan kesalahan personal dalam diri siswa itu sendiri, sehingga Kohn menyatakan bahwa dalam terjadinya tindak kecurangan akademis masyarakat jangan selalu mempersoalkan segi karakter siswa saja, tetapi akan lebih bijak jika masyarakat juga mempersoalkan mengenai sistem pendidikan yang berlaku.

Gitaniali (2004) mengemukakan bahwa kecurangan akademis merupakan suatu tindakan penipuan atau ketidakjujuran yang dilakukan secara sengaja pada saat memenuhi atau menyelesaikan persyaratan dan/atau kewajiban akademis. Kecurangan akademis juga didefinisikan sebagai semua perilaku ilegal yang dilakukan oleh peserta didik ataupun pendidik dalam kaitannya dengan tugas-tugas dan presentasi akademik peserta didik. Istilah dishonesty artinya adalah kecurangan atau ketidakjujuran sedangkan academic merupakan semua hal yang berhubungan dengan akademis, teori, dan pengetahuan. Dari definisi tersebut, maka kecurangan akademis (*academic dishonesty*) dapat diartikan sebagai semua tindakan curang atau tidak jujur dalam kaitannya dengan upaya untuk meningkatkan prestasi akademis seorang siswa.

Gitaniali (2004) mengemukakan bahwa beberapa perilaku curang yang dilakukan oleh pengajar antara lain adalah pura-pura tidak melihat tindakan curang atau ketidakjujuran yang sedang terjadi, tidak memberikan perhatian ketika siswa melaporkan tindakan curang, memberikan nilai yang lebih tinggi atau lebih kecil dari yang seharusnya, menerima sogokan atau mengambil keuntungan untuk meluluskan siswa, memanipulasi kehadiran siswa untuk membolehkan siswa yang tidak patuh mengikuti ujian, mendiktekan jawaban pada siswa ketika ujian berlangsung dan

mbolehkan siswa membawa buku pelajaran ke ruang ujian. Salah satu studi oleh Jendrek (1989) tentang reaksi pengajar terhadap kecurangan akademis menemukan bahwa mayoritas pengajar yang menyaksikan adanya kecurangan akademis tidak melaporkan kejadian tersebut (dalam Burke, Polime & Slavin, 2007).

Newstead, Franklin-Stokes dan Armstead (1996) menemukan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku curang. Hal-hal yang sering kali menjadi alasan untuk melakukan perilaku curang antara lain : untuk meningkatkan nilai, adanya tekanan waktu, takut gagal, banyak orang yang melakukan, malas, untuk membantu orang lain, dan lain-lain. Sedangkan yang menjadi alasan untuk tidak melakukan perilaku curang antara lain : hal itu merupakan tindakan yang imoral dan tidak jujur, situasi yang tidak memungkinkan, sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada gunanya, akan mengurangi nilai berharga dari prestasi yang dimiliki, malu jika ketahuan, takut dengan hukuman, tidak adil bagi siswa lain, dan lain-lain.

Etika adalah salah satu cabang dari filsafat yang bertitik tolak dari masalah nilai (value) dan moral manusia yang berkenaan dengan tindakan manusia. Kata etika itu berasal dari kata berbahasa Yunani, yaitu "*ethos*", yang artinya cara bertindak, adat, tempat tinggal, kebiasaan. Sedang kata "moral" yang berasal dari bahasa latin "*mos*" mempunyai arti yang sama dengan etika. Istilah etika itu sendiri sudah dipakai oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384-322 SM) untuk menunjukkan pengertian tentang filsafat moral. Perumusan dari sudut pandang etimologis saja belumlah cukup untuk memahami etika. Untuk itu, terdapat pendefinisian etika yang lebih jelas lagi yang diungkapkan oleh Bertens (2004), yaitu :

1. Etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud di sini adalah kode etik.
3. Etika mempunyai arti lagi : ilmu tentang yang baik atau buruk.

Etika profesi adalah etika yang berkaitan dengan profesi manusia atau etika yang diterapkan dalam dunia kerja manusia. Sehingga etika profesi dapat didefinisikan sebagai kajian etis yang berkaitan dengan profesi yang berlatar belakang pendidikan formal tertentu. Di dalam dunia kerjanya, manusia membutuhkan pegangan, berbagai pertimbangan moral dan sikap yang bijak (Bertens, 1987). "Moralitas" (dari kata sifat Latin *moralis*) mempunyai arti yang pada dasarnya sama dengan "moral", hanya ada nada lebih abstrak. Kita berbicara tentang "moralitas suatu perbuatan", artinya,

segi moral suatu perbuatan atau baik buruknya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk.

Berbicara mengenai jaringan kejahatan, tentunya terlebih dahulu kita memahami makna ‘jaringan’ itu sendiri. Adapun komponen-komponen sebuah jaringan adalah sebagai berikut (Agusyanto, 2007 : 8-9) :

1. Sekumpulan orang, objek, atau kejadian; minimal berjumlah tiga satuan –yang berperan sebagai terminal (pemberhentian). Biasanya direpresentasikan dengan titik-titik, yang dalam peristilahan jaringan disebut sebagai aktor atau node.
2. Seperangkat ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Ikatan ini biasanya direpresentasikan dengan “garis”, yang merupakan suatu saluran atau jalur. Berupa “mata rantai” atau “rangkaian”. Ikatan ini bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : (a) ikatan yang nampak; dan (b) ikatan yang tidak nampak.
3. Arus, yang dalam diagram digambarkan dengan ‘anak panah’. Ada sesuatu yang “mengalir” dari satu titik ke titik-titik lainnya, melalui saluran atau jalur yang menghubungkan masing-masing titik di dalam “jaringan”.

Terkait dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, antara lain adalah terdapatnya pola tertentu, rangkaian “ikatan-ikatan” itu menyebabkan sekumpulan titik-titik yang ada bisa dikategorikan atau digolongkan sebagai “satu kesatuan” yang berbeda dengan “satu kesatuan” yang lain, ikatan-ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik-titik lainnya harus bersifat relatif permanen (ada unsur waktu, yaitu masalah durasi), dan terdapatnya ‘hukum’ yang mengatur saling keterhubungan masing-masing titik di dalam jaringan, ada hak dan kewajiban yang mengatur masing-masing titik (anggota), hubungan titik yang satu terhadap titik-titik yang lain, hubungan semua titik dengan titik-titik pusat dan sebagainya.

Dalam pandangan Spaulding (Dirdjosisworo, 1985 : 30) mengenai jaringan kejahatan, didefinisikan sebagai sepasang ikatan emosional yang relatif stabil antara orang-orang yang berakibat adanya saluran komunikasi yang bisa disiplin melalui mana informasi dan emosi dapat dengan lebih bebas disalurkan kepada anggota masyarakat yang terikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI online, 2010), sindikat diartikan sebagai : (1). Gabungan beberapa perusahaan dalam suatu bidang usaha, (2). Perhimpunan beberapa orang bermodal untuk mendirikan perusahaan besar, dan (3). Organisasi yang memasok berita (gambar, artikel, dan sebagainya) kepada penerbit surat kabar, majalah, dan sebagainya pada waktu yang bersamaan dan bahan yang sama pula untuk disiarkan. Selain definisi dari KBBI, terdapat pula konsep mengenai sindikat barang ilegal, yaitu sindikat

narkotika dari jurnal “The Rise of Singapore’s Great Opium Syndicate” yang ditulis oleh Carl A. Trocki. Di dalam tulisan tersebut terdapat kesesuaian konsepsi dari sindikat atas hal yang ilegal, yang mana sindikat umumnya dilakukan oleh beberapa pihak, 2 (dua) atau lebih pihak yang terlibat, dengan memiliki tujuan kegiatan yang umumnya mencari keuntungan bagi mereka –mayoritas adalah keuntungan materi (uang)–. Sindikat itu sendiri ada yang sifatnya permanen atau dalam jangka waktu yang lama atau hanya sementara saja. Tentunya, pihak yang terlibat dalam sindikat memiliki unsur saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sama-sama memiliki kebutuhan namun kebutuhan tersebut belum tentu sama satu dengan yang lainnya (Trocki, 1987).

Berbicara mengenai perilaku menyimpang siswa, perilaku menyimpang siswa dipandang sebagai pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku bagi mereka dalam kedudukan sebagai siswa sekolah. Tata tertib siswa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh sekolah, mengatur hak dan kewajiban, larangan-larangan, dan sanksi (Djuita, 1987:19).

Tindakan kejahatan dapat dilakukan secara individual dapat juga dilakukan secara terorganisasi (Sampson dan Laub 1992 : 63-84). Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada dasarnya merupakan bisnis barang jasa ilegal. Mendefinisikan *organized crime* memang tidak mudah. Dipergunakannya istilah dalam bahasa Inggris untuk bentuk kejahatan ini karena *organized crime* tidak semata-mata kejahatan terorganisasi, sebab terorganisasi saja tidak mencerminkan adanya usaha atau bisnis (Walklate, 1998 : 550-569). Selain penjelasan tersebut, terdapat pula pembahasan lain mengenai konsep kejahatan sebagai tindakan bisnis. Dikemukakan oleh Vold bahwa terdapat bentuk spesifik dari *organized crime*, yaitu sindikat, pemerasan, serta suap politik dan korupsi. Sindikat kejahatan relatif berupa tipe yang stabil dari organisasi bisnis. Organisasi bisnis yang dimaksud ialah organisasi bisnis yang mengintergerasikan dan mengkoordinasikan peluang berbuat kejahatan, praktik kejahatan, dan personilnya kepada sebuah pekerjaan, yang berskala luas dengan memberi jaminan keuntungan yang besar bagi organisasi tersebut. Hal tersebut dapat saja memberikan pengaruh yang besar pada komunitas lokal, negara, atau pun terhadap bangsa (Vold, 1979 : 346-347).

Hagan mencoba mengambil konsep mengenai pola klasik dari *organized crime* yang sebelumnya telah dikemukakan oleh Ralph Salerno dan John S. Tompkins. Mereka menggambarkan pola klasik dari *organized crime*, yang merupakan sebuah pergerakan yang berangsur-angsur dari “kejahatan dengan menggunakan strategi dan taktik” menjadi sebuah “bisnis dan kegiatan ilegal” yang selanjutnya berubah lagi menjadi “bisnis legal”, dan akhirnya berkembang lagi menjadi “bisnis besar” (Hagan, 1986 : 334-341).

Dengan demikian, pengertian utama yang terkandung dalam konsep *organized crime* adalah lebih dilihat dari sudut pandang “cara”, yang mana berupa kegiatan bisnis (produksi dan distribusi) atas barang dan jasa yang haram atau dilakukan secara tidak sah dan bukan tentang organisasi penjahat.

Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep *white-collar crime*. Kejahatan yang dikategorikan sebagai *white-collar crime* tidak didasarkan pada bentuk tindakan yang merugikan tetapi lebih diutamakan didasarkan pada ciri pelakunya. Pengertian dasar dari konsep *white-collar crime* yang dikemukakan oleh Sutherland adalah untuk menunjuk tipe pelaku dari suatu bentuk kejahatan (*White-Collar Criminal*) yaitu, “orang dari kelas sosial ekonomi tinggi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang dibuat untuk mengatur pekerjaannya” (Sutherland, 1949 : 9). Dari batasan tersebut tampak bahwa yang menjadi perhatian dari Sutherland adalah jenis pelaku dari suatu tindakan pelanggaran hukum yang diberi identitas “white-collar” atau orang terhormat.

Clinard dan Quinney (1973 : 188) mengemukakan konsep *white-collar crime* dengan membagi menjadi dua konsep yaitu *occupational crime* dan *corporate crime* yang berarti : “Occupational crime consists of offenses committed by individuals for themselves in the course of their occupation and the offenses of employees against their employers. Corporate crime consists of the offenses committed by corporate officials for their corporation and offenses of the corporation itself”. Terjemahan bebas : “*Occupational crime* merupakan tipologi yang terdiri atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh individu untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, dan berkaitan dengan pekerjaan yang disandangnya. Selain itu, tipologi ini mencakup juga pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik perusahaan terhadap pegawai-pegawainya. Sedangkan corporate crime merupakan tipologi yang terdiri atas bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pegawai korporasi untuk keuntungan korporasi mereka dan bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri.”

Aspek-aspek hukum dari pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam tipologi ini, menurut Clinard dan Quinney (Clinard dan Quinney, 1973 : 187 – 202), terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur keberadaan jenis suatu pekerjaan (occupation) baik itu di dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pada awalnya, peraturan-peraturan tersebut diciptakan untuk menjamin kepentingan sekelompok individu yang menjalankan usaha-usaha yang berkembang dalam sektor ekonomi dan perdagangan, serta melindungi masyarakat dari aktifitas-aktifitas ekonomi dan perdagangan tersebut. peraturan-peraturan tersebut kemudian berkembang untuk menjamin kepentingan sekelompok individu, berkaitan dengan pekerjaannya. Namun

akhirnya, Clinard dan Quinney mengungkapkan bahwa aturan-aturan tersebut kemudian dibuat oleh para penyandang pekerjaan dan profesi itu sendiri, untuk mewakili kepentingan mereka sendiri. Sebab peranan pekerjaannya kemudian merupakan peranan yang semakin penting di masyarakat. Karir kriminal si pelanggar dalam tipologi ini, oleh Clinard dan Quinney diungkapkan bahwa si individu menjadi pelaku memiliki konsepsi diri sebagai seorang kriminal yang sangat minim atau tidak sama sekali. Selain itu, umumnya para pelaku acapkali menganggap dirinya sebagai warga negara yang terhormat, dan tidak sudi disebut sebagai pelanggar hukum. Setiap pelanggaran terhadap hukum selalu disertai dengan berbagai rasionalisasi. Pelanggaran tersebut kemudian cenderung dijadikan bagian dari pekerjaan individu itu sendiri (dianggap wajar). Kemudian Clinard dan Quinney menjelaskan bahwa kelompok pekerjaan lainnya, atau kelompok-kelompok yang termasuk dalam bidang pekerjaan yang sama dengan si pelaku, umumnya dapat mentolerir atau bahkan mendukung pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh si pelaku. Kelompok-kelompok inilah yang termasuk dalam kelompok pendukung perilaku *occupational crime* tersebut.

Mengenai reaksi sosial dan proses legal yang mengiringinya, Clinard dan Quinney menjelaskan bahwa *occupational crime* berbeda dengan tipe-tipe kejahatan lainnya. Perbedaan tersebut selain disebabkan perilaku tersebut memiliki keunikan, juga karena adanya toleransi dan dukungan yang diperoleh dari publik. Keunikan aktivitas dari tipologi kejahatan ini terletak pada kerumitan tindakannya, dan biasanya memiliki difusi yang begitu panjang jangka waktunya dibandingkan jenis-jenis kejahatan lainnya, sehingga visibilitasnya di masyarakat cenderung rendah, yang ditambah juga dengan rendahnya publikasi atas tipologi ini. Akhirnya, sanksi kejahatan lain, yaitu cenderung lebih lunak dan tidak berupa sanksi kriminal, melainkan hanya sanksi administrasi saja.

Kejahatan jabatan birokrasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintahan yang tugas utamanya adalah melayani anggota-anggota masyarakat. Kejahatan jabatan birokrasi ini lebih dikenal dengan sebutan korupsi (Mustofa, 2010 : 96). Terdapat sebuah definisi korupsi secara sosiologis yang mendekati ciri tindakan korupsi yang sesuai dengan data lapangan yang didapatkan, yaitu definisi korupsi yang diajukan oleh Key (1934), Key merumuskan korupsi sebagai “penyalahgunaan pengendalian kekuasaan dan sumber daya pemerintahan untuk kepentingan keuntungan pribadi atau partai ... dan tidak harus berbentuk uang.” Kekuasaan yang dimiliki oleh pelaku dalam kejahatan jabatan birokrasi merupakan alat untuk melakukan kejahatan (Zimring, Johnson, 2005 : 793-796). Penyalahgunaan wewenang (kekuasaan) tersebut terkait dengan

kedudukannya sebagai aparat birokrasi yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kejahatan oleh profesi sebagai salah satu bentuk dari kejahatan jabatan dapat terjadi karena kaum profesional dalam menjalankan profesinya mempunyai hak khusus. Mereka bekerja tidak atas perintah atasan, tetapi berdasarkan keahlian profesionalnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Green (1990), kejahatan oleh profesional merupakan kejahatan jabatan yang sifatnya khas. Mereka adalah kaum pemangku jabatan elite seperti dokter, advokat, psikolog, dan dokter hewan. Sebelum menjalankan profesinya, mereka bersumpah akan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keahlian profesionalnya dan sesuai dengan standar operasi yang baku. Oleh karena itu kaum profesional diikat oleh etika untuk melindungi kepentingan klien atau pasiennya. (Green, 1990 : 15-17, dalam Mustofa, 2001 : 106). Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi, semakin banyak jenis pekerjaan yang minta diakui sebagai pekerjaan profesional, dan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut harus mempunyai izin praktik. Meskipun pekerjaan guru atau dosen bukan pekerjaan yang tertutup atau dapat dilakukan oleh siapa saja, namun untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan tersebut secara profesional dan sesuai dengan kompetensi yang bersangkutan, kini berdasarkan undang-undang tentang guru dan dosen memerlukan sertifikasi pengakuan kompetensi (Mustofa, 2010 : 87). H. Edelhertz (1983) mengkategorikan kejahatan oleh profesi adalah kejahatan jabatan yang paling mengganggu karena para pelakunya tidak merasa sebagai penjahat maupun penipu masyarakat.

Teori pilihan rasional menjelaskan tentang pertimbangan-pertimbangan rasional yang dilakukan oleh calon pelaku kejahatan dalam memutuskan apakah kejahatan akan dilakukan atau tidak. Perhitungan tersebut biasanya terkait dengan untung-rugi serta resiko dalam melakukan kejahatan, menekankan pada pentingnya faktor situasional dalam suatu peristiwa dimana terjadi tindak kejahatan. Teori ini menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan kejahatan didasarkan pada perhitungan *rational costs and benefits* dengan memperhatikan aspek sistem penjagaan atau pengamanan (terkait dengan target kejahatan dan atau lokasi), kesempatan serta peluang yang ada, dan resiko ataupun konsekuensi yang diterima dari sebuah tindak kejahatan. Di dalam teori pilihan rasional, dibahas mengenai analisis resiko dalam bertindak laku jahat, pelaku kejahatan yang melakukan sebuah perhitungan terlebih dahulu sebelum melakukan tindak kejahatan, terdapatnya rasa membutuhkan terhadap sasaran atau targetlah yang utama, atau bahkan rasa ingin memiliki sasaran atau target itulah yang diutamakan. Nilai yang terkandung di dalam sasaran atau target itu sangat diperhatikan

sekali. Terdapat pula perbedaan perspektif mengenai teori pilihan rasional bahwa pendekatan pilihan rasional hanya dapat diaplikasikan pada tipe spesifik tertentu dari kejahatan. Perspektif tersebut berpendapat bahwa teori pilihan rasional ini lebih cocok untuk membahas mengenai pelanggaran instrumental (kebendaan) dibandingkan pelanggaran yang sifatnya ekspresif seperti kemarahan, rasa cemburu, kebencian, dan lain-lain (McCarthy, 2002 : 424).

Selanjutnya kita akan membahas mengenai anomie. Anomie merupakan sebuah keadaan dimana tidak terdapat norma di dalamnya. Dengan memodifikasi konsep awal dari Durkheim, Merton (1957) memandang “anomie as a condition which occurs when discrepancies exist between societal goals and the means available for their achievement.” (Hagan, 1989 : 432-433). Merton mencoba menganalisis mengenai hubungan antara kultur, struktur, dan anomie. Merton mengemukakan bahwa dalam struktur sosial dan budaya dijumpai tujuan, sasaran, atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh ataupun sebagian anggota masyarakat. Tujuan budaya tersebut merupakan hal yang “pantas diraih”. Selain itu, melalui institusi dan aturan struktur budaya mengatur pula cara yang harus ditempuh untuk meraih tujuan budaya tersebut yang mana aturan tersebut bersifat membatasi. Menurut Merton, struktur sosial menghasilkan tekanan ke arah anomie (*strain toward*) dan perilaku menyimpang.

Kontradiksi antara kebudayaan dan struktur sosial inilah yang oleh Merton disebut sebagai anomie. Ketika menghadapi keadaan anomie maka tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah dengan melakukan penyesuaian diri dengan mekanisme tertentu, seperti yang dikemukakan oleh Hagan yang mengacu pada teori yang diajukan oleh Merton bahwa, “this discrepancy between goals and means produces various modes of personality adaptation : the conformist, the innovator, the ritualist, the retreatist, and the rebel ” (Hagan, 1989 : 432-433).

Sub kebudayaan kriminal dalam *differential opportunity structure*, seperti adaptasi konflik dan retreatisme memerlukan lingkungan tertentu untuk dapat berjalan baik. Di antaranya dukungan lingkungan dari gaya kriminal dalam hidup, adalah terdapatnya integrasi pelanggar dari berbagai tingkatan umur dan integrasi tertutup dari pembawa nilai-nilai konvensional dan ilegal. (Wolfgang, Savitz, dan Johnston, 1970 : 304). Banyak kriminolog berpendapat bahwa tingkah laku kriminal mengisyaratkan kumpulan pola dari hubungan yang membutuhkan nilai dan keahlian tersebut dikomunikasikan dan ditransmisikan dari satu tingkatan umur tertentu ke tingkatan umur yang lain. Hal krusial dalam pembahasan ini adalah tujuan untuk sukses atau berhasil tidak secara keseluruhan tersedia

bagi orang-orang dari posisi yang berbeda di dalam struktur sosial. Sub kebudayaan kriminal tumbuh di lingkungan dengan karakteristik keterikatan yang erat antara perbedaan tingkatan umur pelanggar dan antara kejahatan dan elemen konvensional. Sebagai konsekuensi dari hubungan yang terintegrasi tersebut, sebuah struktur kesempatan pun hadir dan memberikan kesempatan alternatif untuk mencapai tujuan sukses

Hasil Penelitian

Jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional 2010 ini terdiri dari cukup banyak pihak yang terlibat. Aktor yang bermain dalam jaringan ini adalah :

1. Tirto, alumni Geng KBB yang mengenalkan Abib kepada Pak Pandi.
2. Abib, junior Tirto, juga anggota Geng KBB. Abib mengomandoi anggota Geng KBB yang lain dalam jual-beli kunci jawaban.
3. Pak Pandi, pegawai dinas pendidikan kota X yang secara sah ditugasi mengurus percetakan soal Ujian Nasional untuk regional kota X.
4. Asep, kuli percetakan soal Ujian Nasional untuk propinsi Z yang mencuri soal Ujian Nasional yang rusak untuk kemudian dijual kepada Pak Pandi.
5. Pak Kun, guru SMA yang mengerjakan soal Ujian Nasional untuk mendapatkan kunci jawabannya.
6. Bendot, anggota Geng KBB yang menjual kunci jawaban di sekolahnya.
7. Riri, ketua kelas yang mengkoordinasi distribusi kunci jawaban, Riri adalah teman sekolah Bendot.

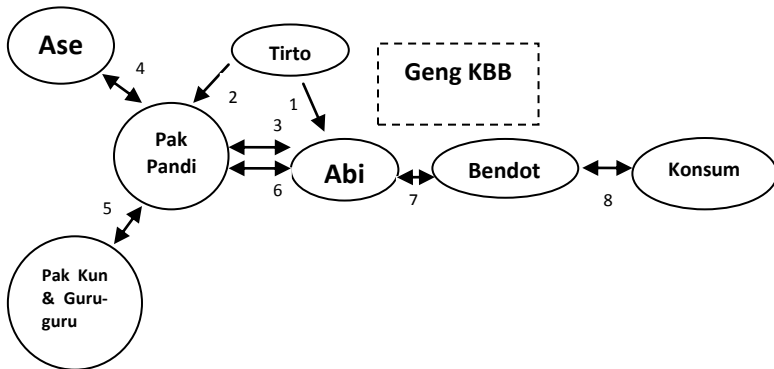
Berawal dari Tirto yang menawarkan kepada Abib mengenai adanya kesempatan untuk melakukan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional 2010, setelah Abib setuju, Tirto pun mengenalkan Abib kepada Pak Pandi. Setelah itu Tirto, tidak lagi terlibat sehingga peranan Tirto hanya sampai pada tahap saling mengenalkan Pak Pandi dan Abib. Selanjutnya Pak Pandi melakukan perencanaan dengan Abib, dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu dalam menjalankan tindakan tersebut. Abib tinggal menunggu saja kunci jawaban dari Pak Pandi, yang mana Pak Pandi memang menjanjikan hal tersebut.

Dalam masa Abib menunggu kunci jawaban, Pak Pandi melakukan kerjasama dengan Asep di tempat percetakan Ujian Nasional. Pak Pandi mampu melakukan hal tersebut karena ia memang secara sah ditugaskan untuk mengurus persoalan percetakan soal Ujian Nasional untuk regional kota X. Dalam melakukan tugasnya, Pak Pandi menyalahgunakan wewenangnya dan justru bekerjasama dengan Asep –kuli percetakan- untuk membocorkan soal Ujian Nasional. Setelah mendapat bocoran soal Ujian

Nasional dari Asep, Pak Pandi menghubungi Pak Kun dan rekannya yang berprofesi sebagai guru untuk membantunya mengerjakan soal tersebut guna mendapatkan kunci jawaban. Setelah mendapatkan kunci jawaban, Pak Pandi menghubungi Abib selaku bos Geng KBB, kemudian Pak Pandi menjual kunci jawaban tersebut kepada Abib, yang selanjutnya kunci jawaban tersebut dijual kembali oleh Geng KBB di 15 SMA di kota X. Kunci jawaban Ujian Nasional pun sampai di tangan pembeli. Salah satunya adalah Riri, seorang siswa SMA negeri di kota X yang membeli dan menggunakan bocoran kunci jawaban.

Untuk lebih memudahkan pemahaman, di halaman selanjutnya dilakukan penggambaran jaringan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional 2010 di kota X :

Skema Jaringan Jual-Beli Kunci Jawaban Ujian Nasional 2010 di kota X



Tindakan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional 2010 di kota X ini merupakan sebuah kejahatan sindikasi dimana jaringan ini bersifat temporer, terbentuk sesuai kebutuhan bersama, dan didalamnya terdapat unsur saling membutuhkan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa tindakan tersebut belum mengarah pada konsep *organized crime* yang dikemukakan oleh Abadinsky. Sindikat tersebut juga terdiri dari orang-orang yang memiliki peranan masing-masing yang saling mendukung pihak lainnya, dan juga masing-masing pihak melakukan tindakan kejahatan tersendiri yang berbeda-beda tipologinya, yaitu : (a). Asep, kuli percetakan, melakukan tindakan *occupational crime*, (b). Pak Pandi, pegawai dinas pendidikan kota X yang bertugas mengurus pencetakan soal Ujian Nasional, melakukan tindak kejahatan jabatan profesi dan *occupational*

crime, (c). Pak Kun dan guru-guru yang melakukan pembiaran dan dukungan melakukan tindak kejahatan oleh profesi dan pelanggaran etika profesi, (d). Geng KBB sebagai sebuah bentuk geng kriminal non-kekerasan, (e). Geng KBB dan Riri, yang menggunakan bocoran kunci jawaban ketika menghadapi Ujian Nasional, melakukan kecurangan akademis, penyimpangan, dan pelanggaran etika.

Kesimpulan

Terdapat dua motivasi yang melatarbelakangi pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan tersebut, yaitu motivasi reputasi dan motivasi ekonomi, sebelum melakukan tindakannya, mereka sudah mempertimbangkan segala keuntungan, kerugian, peluang, dan resiko yang kemungkinan akan mereka dapatkan apabila melakukan tindakan tersebut. Terdapatnya situasi anomie merupakan salah satu faktor pendukung terjadinya tindakan jual-beli kunci jawaban Ujian Nasional 2010 di kota X.

Daftar Pustaka

- Abadinsky, Howard. *Organized Crime* : Sixth Edition. Wadsworth. United States of America, 1991.
- Agusyanto, Ruddy. *Jaringan Sosial dalam Organisasi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi., Cepi Safrudin, dan Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* : Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2008, hal. 29.
- Atmodiwirio, Soebagio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Ardadizya Jaya, Januari 2005, hal. 49.
- Bertens, K., *Etika*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Cressey, *Theft of The Nation*, hal. 72-108, "Demand, Supply, and Profit".
- Clinard, Marshall B., dan Richard Quinney. *Criminal Behavior Systems : A Typology*. Chapel Hill, North Carolina. September, 1972.

- Hagan, Frank. E., *Introduction to Criminology. Theories, Methods, and Criminal Behavior*. Nelson-Hall, Chicago, 1986.
- Hamad, Ibnu. *Membumikan Kriteria Kualitas Penelitian*, Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi, Vol. IV No.1, Januari-April, Depok: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, 2005, hal.5.
- Kelly, Delos H. *Deviant Behavior : Readings in the Sociology of Deviance* (New York : St. Martin's Press, 1979), hal. 96-97.
- Keraf, Gorys. *Komposisi – Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, Cetakan VIII, Penerbit Nusa Indah, 1989, hal. 161.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997, hal.139.
- Maltz, Michael. dikutip oleh : Howard Abadinsky, *Organized Crime – Third Edition*, Nelson-Hall Chicago, 1990, hal. 4.
- Mudyahardjo, Redja., *Filsafat Ilmu Pendidikan : Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2004, hal. 64.
- Mustofa, Muhammad. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Penerbit FISIP UI Press, Depok, 2007. Hal. 132 dan hal. 127.
- Mustofa, Muhammad. *Kleptokrasi : Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White Collar-Crime di Indonesia*. Penerbit Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Mustofa, Muhammad. *Metodologi Penelitian Kriminologi : Edisi Kedua*. Depok : FISIP UI Press, 2005.
- Nazir, Mohammad. Ph.D., *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 64.
- Niti Baskara, Ronny. *Ketika Kejahatan Berdulat : Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum, Sosiologi*. Penerbit Peradaban, Jakarta, 2001, hal. 139.

- Reksodiputro, Mardjono. Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Terorganisasi di Indonesia (Suatu Tanggapan). Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengadilan Hukum Universitas Indonesia, Edisi Pertama Cetakan Pertama, Jakarta, 1997, hal 118.
- Ritzer, George., dan Douglas J. Goodman. Teori Sosiologi Modern : Edisi Keenam. Diterjemahkan dari karya aslinya 'Modern Sociological Theory' : 6th Edition oleh Alimandan. Jakarta : Penerbit Prenada Media, 2004.
- Salim, Burhanuddin. Etika Sosial : Asas Moral dalam Kehidupan Manusia. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 1997.
- Teichman, Jenny. Etika Sosial. Yogyakarta : Penerbit Kanisius Pustaka Filsafat, 1998.
- Sunarto, Kamanto. Pengantar Sosiologi : Edisi revisi. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Tianto dan Tutik, Titik. T. Tinjauan Yuridis Hak serta Kewajiban Pendidik Menurut UU Guru dan Dosen. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006.
- Academic Dishonesty : A Crisis on Campus. Burke, Jacqueline A., Polimeni, Ralph S and Slavin, Nathan S. (2007). The CPA Journal. Vol. 77, Iss. 5; pg.58.<http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1284841491&sid=8&fmt=4&clientId=455625&RQT=309&VName=PQD>. 29 September 2010.
- Academic dishonesty in Indian Medical Colleges. Journal of Postgraduate Medicine. Author(s): Gitani B. Vol. 50, 2004. Iss. 4; pg. 281. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1211569341&sid=2&Fmt=3&clientId=455625&RQT=309&VName=PQD>. Akses : 29 September 2010
- Cheating. Author(s) : Stuart P. Green. Source : Law and Philosophy, Vol. 23, No. 2 (Mar, 2004), pp. 137-185. Published by : Springer. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/4150568>

Crime and Deviance in the Life Course. Author(s): Robert J. Sampson and John H. Laub Source: Annual Review of Sociology, Vol. 18 (1992), pp. 63-84 Published by: Annual Reviews Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/2083446>

Crime and Community: Fear or Trust? Author(s): Sandra Walklate Source: The British Journal of Sociology, Vol. 49, No. 4 (Dec., 1998), pp. 550-569 Published by: Blackwell Publishing on behalf of The London School of Economics and Political Science Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/591288>

Dishonesty in the Academy. Author(s): Robert Hupmant. Source : Academe, Vol. 88, No. 6 (Nov-Dec, 2002), pp. 39-44. Published by : American Association of University Professors. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40252440>

Ethical Context, Organizational Commitment, and Person-Organization Fit. Author(s): Sean Valentine, Lynn Godkin, Margaret Lucero Source: Journal of Business Ethics, Vol. 41, No. 4 (Dec., 2002), pp. 349-360 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25074933.pdf> Accessed: 27/09/2010 07:05

Ethical Misconduct in the Business School : A Case of Plagiarism That Turned Bitter. Author(s): Carlos Cabral-Cardoso Source: Journal of Business Ethics, Vol. 49, No. 1 (Jan., 2004), pp. 75-89 Published by: Springer Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/25123151.pdf?acceptTC=true> Accessed: 27/09/2010 06:56

Fenomena perilaku menyimpang siswa. Yahya Mulyadi. <http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/69074351.pdf>

Honesty and Honor Codes. Author(s): Donald McCabe and Linda Klebe Trevino. Source : Academe, Vol. 88, No. 1 (Jan. – Feb, 2002), pp. 37-41. Published by : American Association of University Professors. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/40252118>

Intellectual Honesty. Author(s) : Louis M. Guenin. Source : Synthese, Vol. 145, No. 2, Candor in Science (Jun, 2005), pp. 177-232. Published by : Springer. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/20118591>

Is Classroom Cheating Related to Business Students' Propensity to Cheat in the "Real World"? Author(s) : Raef A. Lawson. Source: Journal of Business Ethics, Vol. 49, No. 2 (Jan, 2004), pp. 189-199. Published by : Springer. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/25123163>

Keluarga Sebagai Peletak Dasar Pendidikan Moral Bangsa Dalam Pembangunan. Oleh: Yosephine Nurasih dan Mujinam dalam Jurnal Cakrawala Pendidikan No. 2 Tahun XVI, Juni 1997.

Morality. Author(s): L. T. Yacasua Source: The Phi Delta Kappan, Vol. 55, No. 9 (May, 1974), pp. 608-610 Published by: Phi Delta Kappa International Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/20297703.pdf> Accessed: 27/09/2010 07:09

Newstead, Stephen E, Franklin-Stokes A & Armstead P. (1996). Individual Differences in Student Cheating. Journal of Educational Psychology. Vol. 88 (2) 229-241.

Rationality, Morality, and Exit. Author(s): Viktor J. Vanberg and Roger D. Congleton. Source: The American Political Science Review, Vol. 86, No. 2 (Jun., 1992), pp. 418-431 Published by: American Political Science Association Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/pdfplus/1964230.pdf> Accessed: 27/09/2010 07:11.

Teaching Integrity. Author(s) : John Dichtl. Source : The History Teacher, Vol. 36, No. 3 (May, 2003), pp. 367-373. Published by : Society for History Education. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/1555693>

The Rise of Singapore's Great Opium Syndicate, 1840-86. Author(s) : Carl A. Trocki. Source : Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 18, No. 1 (Mar., 1987), pp. 58-80. Published by : Cambridge University Press on behalf of Department of History, National Unity of Singapore. Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/20070942> Accessed : 02/11/2010 03:36

Who's Cheating Whom?. Author(s) : Alfie Kohn. Source: The Phi Delta Kappan, Vol. 89, No. 2 (Oct, 2007), pp. 88-94, 96-97. Published by :

Phi Delta Kappa International. Stable URL :
<http://www.jstor.org/stable/20442425>

Distribusi Soal UN Bermasalah. Radar Banten, Selasa, 17 April 2007, 07:21:47 WIB diunduh pada Selasa, 8 Juni 2010.

Dinas P&K Bantah Ada Kebocoran UN. Rabu, 25 April 2007, 06:19:24. www.radarbanten.com diunduh pada Selasa, 8 Juni 2010.

Guru Besar Universitas Negeri Jakarta, Prof Dr Arif Rahman dalam artikel “Menanti Realisasi Pemetaan Hasil Ujian Nasional” dalam erabarunews.com Sabtu, 20 Maret 2010 diunduh pada Selasa, 8 Juni 2010.

Siswa Cemas Hadapi UN. Harian Umum Pelita. Edisi Selasa , 25 Mei 2010.

Informasi dari Dinas Pendidikan Kota X, 20 Februari 2010.

Informasi Departemen Pendidikan Nasional di websitenya, diunduh pada 28 Februari 2010.

Koran Tempo, Kamis 4 Maret 2010.

Kuantitas vs Kualitas Hasil Ujian Nasional. Kamis, 5 November, 2009 diunduh pada Selasa, 8 Juni 2010.

Republika, 26 Nopember 2009 diunduh pada Selasa, 8 Juni 2010.

Wawasan, 25 Nopember 2009 diunduh pada Selasa, 8 Juni 2010.